

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya suatu Negara bisa berdiri jika memiliki empat unsur, diantaranya adanya wilayah, warga Negara, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari Negara lain. Salah satu komponen penting dalam proses berdirinya suatu Negara ialah adanya warga Negara. Konsep warga Negara dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya dari pengertian secara umum, serta dapat dilihat dari aspek yuridis khususnya Negara Indonesia. Secara umum, istilah warga Negara merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda yaitu *staatsburger*. Namun menurut Komalasari dan Syaifullah (2009, hlm. 1) bahwa “Dalam pengertian yang sama, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *citizen* dan pada terjemahan Perancis ada istilah *citoyen*.”

Warga Negara merupakan terjemahan dari beberapa bahasa asing yang dulu pernah berpengaruh besar terhadap pembentukan sejarah bangsa Indonesia, diantaranya Bahasa Belanda yaitu *staatsburger*, Bahasa Inggris yaitu *citizen*, dan Bahasa Prancis yaitu *citoyen*. Ketiga terjemahan bahasa tersebut secara harfiah adalah warga Negara. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006, warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara. Dengan berstatus sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Indonesia merupakan Negara demokrasi, dimana keterlibatan warga Negara sangat penting peranannya dalam memajukan suatu Negara.

Demokrasi memerlukan komponen agar sistem ini bisa berjalan dengan baik, salah satunya yaitu peran aktif warga negara. Warga negara aktif

(*active citizenship*) didefinisikan oleh Hoskins dan Mascherini dari *European Commission's Joint Research Centre* sebagai *participation in civil society, community and/or political life, characterized by mutual respect and non-violence and in accordance with human rights and democracy* (Hoskins & Mascherini, 2009, hlm. 462)

Gagasan di atas menunjukkan bahwa partisipasi untuk kehidupan masyarakat pada dimensi publik/umum sesuai dengan konsep HAM dan demokrasi, yaitu saling menghormati dan tanpa kekerasan. Menurut Quigley (dalam Abdillah, 2013, hlm. 38), dimensi partisipasi warga negara dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari warga negara, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran serta aktif warganegara. Tujuan-tujuan tersebut dapat terlihat dengan berbagai bentuk peran serta dan aksi-aksi sosial di masyarakat.

Menurut Jacoby (dalam Abdillah, 2013, hlm. 3) sebagai berikut:

Keterlibatan warga negara (*civic engagement*) merupakan suatu kondisi atau norma dimana warga negara secara individual ataupun kolektif berpartisipasi aktif di kehidupan bermasyarakat berdasarkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, yang berkombinasi dengan nilai-nilai, motivasi dan komitmen untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Pendefinisian *Civic engagement* (Keterlibatan warga negara) bergantung pada perspektif dan kepentingan pembuat definisinya. Bahwa "*civic engagement is a complex and polyonymous concept*", mengingat para praktisi dan sarjana masih menggunakan bermacam-macam nama untuk hal ini. Ramaley (dalam Abdillah, 2013, hlm. 21) menjabarkan perspektif dan kepentingan *civic engagement* yang dimaksud antara lain; *Civic engagement as community service*, *Civic engagement as collective action*, *Civic engagement as political involvement* dan terakhir *Civic engagement as social change*. Menurut Jacoby (dalam Abdillah, 2013, hlm. 21), *civic engagement* bisa didefinisikan dengan bagaimana warga negara secara *individual* ataupun kolektif berpartisipasi aktif di kehidupan bermasyarakat berdasarkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, yang

berkombinasi dengan nilai-nilai, motivasi dan komitmen untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Namun, keterlibatan warga negara di sini berfokus pada peran warga negara dalam berkehidupan bermasyarakat, atau peran serta dan aksi-aksi sosial di masyarakat.

Aksi sosial adalah suatu kegiatan yang terkoordinasikan untuk mencapai tujuan perubahan kelembagaan dalam rangka memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, mengoreksi ketidakadilan atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Terjadi atas inisiatif dari tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, agama, militer, orang-orang yang secara langsung terkena masalah. Dalam hal ini, aksi sosial tersebut sangatlah penting dilakukan oleh masyarakat guna mencapai yang kesejahteraan sosial masyarakat. Peran masyarakat dalam kegiatan sosial merupakan wujud dari tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. Menurut Gallay (dalam Abdillah, 2013, hlm. 34) sebagai berikut:

Tanggung jawab sosial atau *Social responsibility* adalah sebuah konsep yang digunakan oleh para ahli di berbagai domain. Definisi bersama seluruh disiplin ilmu adalah bahwa *social responsibility* mencerminkan kekhawatiran yang melampaui diri sendiri.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak budaya, dari mulai tarian, lagu, alat musik, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan unik masyarakat yang mempunyai nilai kearifan lokal, salah satunya yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan adat istiadat berupa tolong menolong antara warga desa dalam berbagai macam aktivitas-aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, hubungan kekerabatan, maupun hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. Melalui aktivitas gotong royong ini tercipta rasa kebersamaan dan hubungan emosional antarwarga, keakraban dan saling mengenal satu sama lain. Bintarto (1980, hlm. 14) mengungkapkan bahwa, dalam artian yang sebenarnya gotong royong dilaksanakan oleh sekelompok penduduk di suatu daerah yang datang membantu atau menawarkan tenaganya tanpa pamrih atau dengan lain perkataan secara sukarela menolong secara bersama. Perilaku gotong royong tersebut tentu saja dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia jika tetap dipelihara oleh masyarakat

pedesaan, karena merupakan sebuah manifestasi budaya yang telah ada dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat. Namun melihat kondisi saat ini harapan kehidupan masyarakat pedesaan sebagai standar dan pemeliharaan kegiatan gotong royong sepertinya sulit terwujud. Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat pedesaan yang mulai berkembang dan mulai meninggalkan tradisi gotong royong.

Perkembangan masyarakat pedesaan dapat disebabkan oleh saling mempengaruhinya warga satu dengan warga lain. Hal itu disebabkan karena kebudayaan dengan masyarakat sistem terbuka. Dengan keadaan tersebut, maka kebudayaan lambat laun akan mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan masyarakat terutama di pedesaan. Disadari atau tidak, sifat kegotong royongan ini secara perlahan namun pasti telah semakin memudar. Suatu bentuk dan sikap hubungan gotong royong akan mundur ataupun punah sama sekali sebagai akibat pergeseran nilai-nilai budaya. Kondisi ini umumnya dipicu oleh pemikiran materialistik yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat kita dewasa ini. Semua aktivitas diukur dengan untung rugi secara materi. Dalam penelitian yang berjudul “*Kajian Tentang Pergeseran Makna Dan Pola Gotong Royong Pada Masyarakat Desa Gandamekar Dalam Konteks Tradisi Dan Modernisasi*” pada tahun 2012 oleh Dini Andriani dapat disimpulkan bahwa dalam arus globalisasi dan modernisasi sekarang ini, menyebabkan masyarakat desa yang terkenal dengan tradisi kegotong-royongan mulai mengalami pergeseran dikarenakan adanya peralihan nilai-nilai yang bersifat tradisional ke proses modernisasi.

Perkembangan jaman yang semakin modern, pola pikir masyarakat yang mulai materialistik dan individual, serta meninggalkan gotong royong. Indonesia masih mempunyai sebuah tradisi yang mempunyai nilai gotong royong, yaitu *perelek*. *Perelek* merupakan tradisi masyarakat sunda yang berupa pengumpulan beras atau uang dari warga, kemudian uang atau beras tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau pun untuk membantu masyarakat yang kesusahan dan sedang memerlukan bantuan materil. *Perelek* menjadi sarana masyarakat untuk melakukan aktivitas keterlibatan sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat. *Perelek* adalah wujud dari *Gotong-royong*. Gotong-royong

merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini pula yang menjadi cikal bakal perumusan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia. Semangat gotong-royong telah mengilhami lahirnya sila-sila Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Kearifan lokal yang mempunyai muatan *Civic Engagement* yang menjadi tradisi di tengah masyarakat Indonesia dan merupakan warisan para leluhur bangsa. Dengan adanya *perelek* menjadikan masyarakat berpartisipasi aktif untuk melakukan perubahan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. *Perelek* berpotensi bisa menjadi sarana yang baik untuk pendidikan kewarganegaraan dan membudayakannya dalam aspek *Civic Engagement*.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota berkembang di Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga, Kota Tasikmalaya mempunyai berbagai macam budaya, salah satunya ialah *perelek*. Tasikmalaya merupakan salah satu Kota di Jawa Barat yang masih melestarikan *perelek*, terutama di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Kelurahan Bungursari masih menggalakan *perelek*, karena *perelek* sangat berpotensi untuk menjadi sarana masyarakat dalam mengembangkan tanggung jawab sosial sebagai warga Negara Indonesia. Menurut Nur (warga bungursari), *perelek* sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, dimana pada zaman dahulu masyarakat Kelurahan Bungursari sering melaksanakan *perelek* setiap sore dengan sistem bergilir, dari satu rumah ke rumah yang lain.

Merujuk pada berbagai penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti *Perelek* karena mempunyai banyak nilai yang terkandung di dalamnya, terutama nilai keterlibatan warga negara. *Perelek* berfungsi sebagai media untuk menumbuhkan kepekaan terhadap tanggung jawab sosial masyarakat. Selain itu, di tengah jaman yang semakin modern dan individualis ini, masih ada masyarakat yang melaksanakan kegiatan *perelek* tersebut.

Berangkat dari ketertarikan tersebut, peneliti memulai dengan mencari permasalahan yang senada dengan permasalahan di atas. Maka dari itu, peneliti melakukan kegiatan pra penelitian di Kelurahan Bungursari. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Lurah Bungursari, menemukan dua permasalahan mengenai *perelek* sebagai nilai keterlibatan warga Negara terhadap

tanggung jawab sosial, diantaranya yaitu pertama, pemuda di Kelurahan Bungursari tidak lagi ikut berpartisipasi dalam *perelek*. Penyebabnya yaitu tidak ada ketertarikan pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan *perelek*, dan banyaknya anak muda di kampung sukasari yang bekerja di luar kota.

Permasalahan lain yang ditemukan peneliti dari hasil wawancara yaitu Pemerintah Kota Tasikmalaya kurang memperhatikan *perelek*, padahal potensi *perelek* sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan warga Negara dalam bidang sosial itu sangat besar. Seharusnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengikuti jejak Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal pengembangan *perelek*. Seperti yang diungkapkan dalam berita berikut:

TEMPO.CO, Purwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menghidupkan kembali budaya lawas beras *perelek*. Tujuannya menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial di antara warga di wilayah terkecil, yakni rukun tetangga atau RT. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan bahwa beras *perelek* adalah kegiatan yang dilakukan sejak lama. Caranya, beras dikumpulkan dengan menggunakan ruas bambu. Beras yang ditaruh di ruas bambu itu terpasang di depan tiap-tiap rumah dari keluarga mampu. Kemudian, beras diambil dan dikumpulkan oleh pengurus RT. "Setiap hari, satu keluarga ada yang mengisi satu atau dua sendok bahkan ada yang setengah gelas," kata Dedi. Beras *perelek* tersebut kemudian dikumpulkan di "lumbung" RT. Jika ada warga yang benar-benar tak memiliki beras, otomatis pengurus RT mengambil beras dari lumbung. Selain itu, beras di lumbung bisa dijual untuk membelikan lauk-pauhnya. "Alhasil warga miskin bisa langsung ditolong warga dan tak usah meminta bantuan lagi dari pemerintah," kata Dedi. Praktek subsidi beras *perelek* ini, Dedi mengatakan, akan tumbuh rasa tali persaudaraan yang tinggi. "Si kaya dan si miskin pun saling menyayangi dan saling menghormati satu sama lain." (Ichsan, 2016, Bupati Purwakarta Giatkan Kembali Program Beras *Perelek*, <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/02/058741380/bupati-purwakarta-giatkan-kembali-program-beras-perelek>, diakses tanggal 19 Desember 2016).

Permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas menjadi dorongan terhadap Pemerintah dan Masyarakat Tasikmalaya untuk lebih melestarikan dan mengembangkan sistem *perelek* yang ada sekarang. Adanya *perelek* di Kota Tasikmalaya sangat menarik untuk diteliti baik dalam bentuk pelaksanaannya maupun outputnya.

Berangkat dari ketertarikan yang didukung dengan pemahaman di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

Alvin Hikmatyar, 2017

PERELEK SEBAGAI NILAI KETERLIBATAN WARGA NEGARA TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI KELURAHAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“PERELEK SEBAGAI NILAI KETERLIBATAN WARGA NEGARA TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI KELURAHAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah secara umum, yaitu bagaimana peran *perelek* sebagai nilai keterlibatan warga Negara terhadap tanggung jawab sosial di Kelurahan Bungursari Kota Tasikmalaya? Adapun secara khusus dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman warga Kelurahan Bungursari terhadap *perelek* ?
2. Bagaimana warga menyikapi *Perelek* di Kelurahan Bungursari ?
3. Seperti apa keterlibatan warga dalam *perelek* ?
4. Bagaimana keterkaitan *perelek* terhadap tanggung jawab sosial di Kelurahan Bungursari ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan *perelek* sebagai nilai keterlibatan warga Negara terhadap tanggung jawab sosial di Kelurahan Bungursari Kota Tasikmalaya. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pemahaman warga Kelurahan Bungursari terhadap *perelek*
2. Sikap warga terhadap *perelek*
3. Keterlibatan warga dalam *perelek*
4. Keterkaitan *perelek* terhadap tanggung jawab sosial di Kelurahan Bungursari

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih bermakna bila bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangan terhadap perkembangan kebudayaan di Kota Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang kearifan lokal “*Perelek*” sebagai nilai keterlibatan warga Negara dan kaitannya dengan tanggung jawab sosial masyarakat
- b. Bagi masyarakat, untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kearifan lokal daerah yang benar-benar memberikan arah yang positif terhadap pembangunan sikap dan mental manusia agar berfikir rasional serta dapat melihat manfaat dari kegiatan kearifan lokal tersebut yang tidak berlawanan dengan kaidah dan hukum yang berlaku.
- c. Bagi pemerintah daerah, untuk dijadikan bahan referensi tentang budaya *Perelek*, khususnya di daerah Kota Tasikmalaya. Hal ini dilakukan supaya pemerintah lebih memperhatikan dan mengembangkan *perelek*, serta mengingatkan pemerintah daerah dalam membukukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan budaya daerah.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi merupakan bagian yang memuat sistematika penulisan skripsi sesuai dengan bab, urutan penulisan dan hubungan atau keterkaitan antara bab satu dengan yang lainnya. Sistematika skripsi memuat penjelasan singkat mengenai isi dalam setiap bab pada skripsi ini. Adapun sistematika skripsi *Perelek* sebagai Nilai Keterlibatan Warga Negara terhadap Tanggung Jawab Sosial di Kelurahan Bungursari Kota Tasikmalaya terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai pokok-pokok masalah yang akan diteliti, dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, membahas dan menguraikan materi yang relevan dengan masalah penelitian, hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam menganalisis secara konseptual maupun teoritis terhadap topic yang diangkat. Adapun tinjauan pustakan yang digunakan yaitu mengenai nilai keterlibatan

Alvin Hikmatyar, 2017

PERELEK SEBAGAI NILAI KETERLIBATAN WARGA NEGARA TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI KELURAHAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

warga Negara, informasi singkat mengenai *perelek*, tanggung jawab sosial, dan warga Negara sebagai subjek yang menerima dampak dari kegiatan *perelek*

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga menjelaskan mengenai cara-cara dalam melakukan penelitian. Dimulai dengan desain penelitian, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga analisi dan pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, kemudian temuan di lapangan berdasarkan teknik pengumpulan data melalui deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan deskripsi dari temuan di lapangan yang dikaitkan dengan teori dan konsep.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan yang merupakan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis berdasarkan temuan di lapangan. Implikasi dan rekomendasi dirancang untuk memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan.